

**IMPLEMENTASI JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL(JIKN) DAN KAITANNYA DENGAN KESIAPAN
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IRWANSYAH

NIM : 531002373

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora

Prodi Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perpustakaan


Disusun oleh :

IRWANSYAH

**Fakultas Adab Dan Humaniora
Jurusan Ilmu Perpustakaan
NIM : 531002373**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



(Nurhayati Ali Hasan, M.LIS)
NIP. 197307281999032002

Pembimbing II,



(Drs. Saifuddin A. Rasyid, M.LIS)
NIP. 196002052000031001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1
Dalam Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 09 Agustus 2017 M
16 Dzulqaidah 1428 H

Di

Darussalam – Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



(Nurhayati Ali Hasan, M.LIS)
NIP. 197307281999032002

Sekretaris,



(Drs. Saifuddin A. Rasyid, M.LIS)
NIP. 196002052000031001

Penguji I,



(Drs. Syukrinur, M.LIS)
NIP. 196801252000031002

Penguji II,



(Mukhtaruddin, M.LIS)
NIP. 197711152009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-raniry
Darussalam – Banda Aceh




Syarifuddin, MA., Ph. D
NIP. 197001011997031005

Surat Pernyataan Keaslian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irwansyah

Nim : 531002373

Prodi : SI-IP

Judul Skripsi : Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Dan Kaitannya Dengan Kesiapan Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan



Irwansyah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis persembahkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang dirasakan saat sekarang ini.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah selesai menyusun sebuah skripsi untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan kaitannya dengan Kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Dekan Fakultas Adab Bapak Syarifuddin, MA, Ph.D dan seluruh jajarannya. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Ibu Zubaidah M.Ed dan sekretaris jurusan Ilmu Perpustakaan Bapak Mukhtaruddin, M.LIS serta semua dosen yang telah mendidik penulis selama ini. Kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Adab dan

Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ibu Nurhayati Ali Hasan, M.LIS selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Saifuddin A. Rasyid, M.LIS selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, semangat dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Bapak Zulkifli M. Ali S.Pd, M.Pd, atas izin dan bantuannya kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis persembahkan yang istimewa kepada Ayahanda tercinta Murhaban dan Ibunda tercinta Nurmala, yang telah membesarkan dan memberi kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak pernah henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Kepada adik adik tercinta Masriana, Husnul, Nasri, Riski, Alfi, dan seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, karena doa merekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih untuk para sahabat, dan teman-teman APK 2010 serta kakak dan seluruh anggota KSR PMI unit 02 UIN Ar-Raniry. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat terutama pada diri saya sendiri dan pembaca pada umumnya yang ingin

mengembangkan penelitian ini kearah yang lebih baik lagi, dan kepada Allah SWT juga kita berserah diri. Amin...

Banda Aceh, 8 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan istilah.....	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	12
1. Pengertian Implemntasi JIKN	12
2. Tujuan dan Fungsi JIKN	14
3. Dasar Hukum JIKN.....	15
4. Anggota JIKN	16
C. Elemen Informasi Arsip Statis Pada JIKN	18
1. Pedoman dan Standar JIKN	20
2. Pengembangan JIKN	22
D. Implementasi JIKN terhadap kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisi Data	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	38
C. Pembahasan.....	48
BAB IV : PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran- saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

LAMPIRAN.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anggota JIKN -----	17
Tabel 2.2 Elemen Informasi -----	18
Tabel 2.3 Format Deskripsi Untuk Sub Elemen Informasi -----	19
Tabel 4.1 Laporan Koleksi dan Anggota Pengguna Tahun 2016 Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh-----	37
Tabel 4.2 Laporan Koleksi Deposit dari Tahun 1950-2016 Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh-----	37
Tabel 4.3 Rencana Implementasi SIKN dan JIKN-----	43
Tabel 4.4 Sarana Sistem JIKN -----	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat izin Mengadakan Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Lampiran 5 : Struktur Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Kaitannya dengan Kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh”. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Fokus penelitian ini adalah pada Implementasi JIKN dan kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan bertujuan untuk mengetahui kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Penelitian yang peneliti lakukan ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penulis berupaya melihat fakta-fakta sesuai dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan lingkup penelitian ini dan mendeskripsikannya secara jelas guna memberikan gambaran tentang kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam implementasi JIKN. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang dilakukan melalui langkah-langkah, yaitu mengelompokkan data yang berkaitan dengan proses implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Hasil penelitian yang diperoleh adalah implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sudah berjalan pada bulan Januari tahun 2014. Namun ada beberapa langkah-langkah yang menjadikan kendala pada implementasi JIKN pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, seperti sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi, sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, ketersediaan dana yang juga masih terbatas, serta dukungan sumber daya jaringan yang juga belum memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era informasi merupakan sebuah fenomena dimana baik secara langsung atau tidak langsung akan menyebabkan lahirnya sebuah interaksi antara masyarakat dan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Interaksi ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang diciptakan tersebut dapat mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia pada setiap jenjang serta proses manajemen, yang pada kenyataannya memang bergantung kepada adanya informasi yang cepat, tepat, dan akurat melalui peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu kemudian peran dari TIK menyebabkan penerapan berbagai aplikasi elektronik yang berkaitan dengan layanan pemerintah.

Pemerintah memiliki harapan agar terciptanya interaksi yang efektif dan efisien kepada masyarakat melalui aplikasi elektronik baik di pusat maupun di daerah. Menurut Contini dan Lanzara pertemuan antara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan suatu lembaga menghasilkan fenomena yang membingkai ulang cara melihat struktur organisasi dan kelembagaan secara keseluruhan. Tanpa teknologi mengumpulkan, memproduksi, mengolah, melakukan pertukaran informasi dan mengirimkan pelayanan kepada masyarakat akan sulit dilakukan sehingga sektor

publik sangat bergantung pada infrastruktur informasi.¹ Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang didukung teknologi jaringan memungkinkan informasi tersalur dari satu belahan dunia ke belahan dunia yang lain dalam waktu singkat. Dengan melihat pertemuan antara TIK dan suatu lembaga menyebabkan terbukanya akses yang luas, pengelola, serta pendayagunaan informasi yang merupakan pendorong dalam pelaksanaan *e-government*.

E-government sebagai salah satu aplikasi telematika di pemerintahan dapat memberikan manfaat pada pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang akan membuat masyarakat cepat belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Masyarakat akan semakin cerdas untuk memilih apa yang dibutuhkannya dan apa yang tidak. Dengan semakin cerdasnya masyarakat maka pemerintah harus semakin profesional dalam memberikan pelayanannya. Melalui aplikasi ini setiap orang dapat dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi secara langsung, cepat, dan akurat dalam upaya pemerintah meningkatkan layanannya.

Salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pengembangan *e-government* adalah Arsip Nasional RI (ANRI) melalui bidang kearsipan. Pengembangan bidang ini yang diterapkan ANRI karena melihat kegunaan (manfaat) arsip. Menurut Barthos kearsipan memiliki kegunaan (manfaat) sebagai “pusat ingatan”, sumber informasi, dan alat pengawasan yang diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan,

¹ Contini, Francesco; Lanzara, Giovan Francesco. *ICT and Innovation in the Public Sector: European Studies in the Making of E-Government*. (New York: Palgrave Macmillan, 2009). hlm. 9.

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya.² Arsip juga merupakan salah satu bahan untuk penelitian ilmiah. Usaha-usaha penelitian untuk mempelajari persoalan-persoalan tertentu akan lebih mudah apabila bahan-bahan kearsipan terkumpul, tersimpan baik dan teratur.³

Salah satu peningkatan dan penyempurnaan yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam kearsipan adalah melalui pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip statis secara nasional yang merupakan salah satu usaha ANRI dalam memodernisasi administrasi dan layanan, yang merupakan perwujudan usaha dari ANRI untuk dapat mereformasi administrasi di Indonesia.

Sebagai upaya pengembangan *e-government*, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN, dengan kata lain ANRI adalah aplikasi yang digunakan oleh simpul jaringan untuk memasukkan informasi arsipnya dalam JIKN. Melalui website JIKN, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta perguruan tinggi negeri sebagai simpul

² Barthos, Basir . *Manajemen Kearsipan: Untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara. 2009). hlm. 2

³ Ibid, hlm 3

jaringan akan terhubung, sehingga informasi kearsipan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dimanapun berada. Selain itu SIKN dan JIKN menjadi payung implementasi *e-records* (arsip dinamis) dan *e-archives* (arsip statis) yang selama ini telah dikembangkan oleh ANRI sebagai model, serta sistem kearsipan lainnya yang dikembangkan sendiri oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Dalam konteks NKRI Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan (JIKN) merupakan sarana bantu penyatuan informasi kearsipan dan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah diantara para pencipta arsip maupun lembaga kearsipan di seluruh Indonesia. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, JIKN dapat menjadi sarana bantu implementasi keterbukaan informasi publik oleh seluruh badan publik baik di pusat maupun daerah. SIKN dan JIKN sangat terkait dengan *Open Government* Indonesia, karena melalui website JIKN masyarakat dapat langsung mencari dan mendapatkan informasi dalam wujud arsip secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah, sesuai dengan prosedur dan aturan keterbukaan informasi publik instansi yang bersangkutan⁴ Melalui peran JIKN diharapkan akan tercipta pengaturan informasi arsip yang mendorong adanya budaya berbagi informasi dan kerjasama antar unit kerja, departemen ataupun masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, JIKN yang pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan menghadapi hal baru disebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

⁴ *Jaringan Informasi Kearsipan Nasional*, <https://www.jikn.go.id>, pada tanggal 15 November 2016, diakses pada pukul 15:25

Tentang Kearsipan. Hal ini berkaitan dengan pembangunan Sistem Informasi Kearsipan nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dimana informasi kearsipan yang disediakan tidak lagi hanya terbatas pada khasanah arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan namun juga mencakup informasi mengenai arsip dinamis yang ada disemua lembaga penyelenggara Negara, pusat maupun daerah sebagai pencipta arsip.

Pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan ditingkat daerah belum dapat berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran dan juga rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan. Dalam permasalahan anggaran, penyelenggaraan JIKN dibebankan pada anggaran masing-masing anggota jaringan walaupun dimungkinkan adanya kerjasama pembiayaan diantara pusat dan anggota jaringan. Sarana dan prasarana kearsipan dari tahun ketahun mulai ditingkatkan dengan pembangunan gedung pengolahan arsip, dan penanggulangan bencana dan implementasi JIKN pada pemerintah Provinsi dan implementasi Jaringan Sistem Kearsipan Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh merupakan perpustakaan umum yang berdomisili di Ibu Kota Banda Aceh. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh mempunyai misi menyelenggarakan layanan perpustakaan dan pendayagunaan Arsip sebagai bahan informasi publik.⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh mempunyai tugas untuk mengelola khasanah arsip statis daerahnya. Dengan tujuan untuk

⁵ *Struktur Organisasi Badan Arsip dan perpustakaan Provinsi Aceh*, <http://bap.nad.pnri.go.id>, diakses pada tanggal 15 November 2016, pada pukul 15:32

penyelamatan dan penyediaan arsip sebagai bahan informasi dalam mengembangkan kemampuan mencari, mengelola dan memanfaatkan bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan yang mempunyai fungsi untuk perumusan teknis dan program di bidang arsip dan perpustakaan. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan informasi menjadi faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan dan tugas perpustakaan tersebut.

Dengan adanya penerapan *e-government* dalam bentuk JIKN di bidang kearsipan diharapkan dapat meningkatkan terwujudnya pengelolaan khasanah arsip statis baik di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh agar tersimpan secara sistematis sehingga membentuk suatu sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi khasanah arsip statis secara nasional. Dengan adanya JIKN akan terbentuk suatu standar tentang bagaimana arsip statis diinformasikan kepada masyarakat luas untuk mempercepat menemukan arsip yang dikehendaknya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji secara langsung mengenai implementasi JIKN dan kaitannya dengan kesiapan di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Badan Arsip dan Perpustakaan yang mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi layanan informasi terhadap pengguna perpustakaan baik tingkat daerah maupun provinsi, serta kaitannya dengan kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam mengimplentasikan JIKN, untuk itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ **Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Kaitannya dengan Kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana implementasi JIKN di Badan Arsip Perpustakaan Aceh?
2. Bagaimana kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam mengimplementasikan JIKN?
3. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh pihak Badan Arsip Dan perpustakaan Aceh dalam mengimplementasikan JIKN ?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah :

1. untuk mengetahui Bagaimanakah implementasi JIKN di Badan Arsip Perpustakaan Aceh
2. untuk mengetahui kesiapan Badan Arsip Dan perpustakaan Aceh dalam implementasi JIKN
3. Untuk mengetahui Masalah-masalah apa saya yang dihadapi oleh pihak Badan Arsip Dan perpustakaan Aceh dalam implementasi JIKN, sehingga nantinya dapat dicari solusi terbaik guna mengetahui masalah-masalah tersebut

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini merupakan salah satu peluang ilmu bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan melakukan penelitian dalam menulis karya tulis ilmiah dan sebagai pengembangan wawasan penulis mengenai bidang ilmu yang dikaji
2. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna serta dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui bagaimana implementasi JIKN dan kaitannya terhadap kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan yang berhubungan dengan istilah yang terdapat dalam judul karya ini. Adapun istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi JIKN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁶ Artinya suatu hal yang dilaksanakan dan diterapkan adalah sesuatu yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah

⁶ Lukman Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 447

disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap benar dan layak digunakan.

JIKN adalah sistem jaringan informasi & sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yaitu merupakan website yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai informasi kearsipan dengan sangat mudah. JIKN adalah sebuah *portal/front end* yang berisi arsip statis dan dinamis, siapa saja bisa berselancar disini. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, JIKN dapat menjadi sarana bantu implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh badan publik baik di pusat maupun daerah.

Adapun implementasi JIKN yang penulis maksud disini adalah penerapan sebuah *portal/front end* yang berisi arsip statis dan dinamis, yang telah diterapkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh untuk dimanfaatkan oleh pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan.

2. Kesiapan Badan Arsip Dan Perpustakaan

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban terhadap cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon.⁷ Badan Arsip dan Perpustakaan adalah sebuah badan pengelola naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara dan Badan-badan

⁷Slameto, *Psikologi Pendidikan*, (Semarang: Gramedia, 2003). hlm, 114.

Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah.

Adapun kesiapan Badan Arsip yang penulis maksud disini adalah kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan terhadap sumber daya pendukung dalam implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), seperti: koneksi internet, alat alih media, komputer, SDM untuk pelaksana entry, pelaksana editor dan penentu keterbukaan dan ketertutupan informasi arsip, daftar arsip dinamis, daftar arsip statis, aplikasi pengelolaan arsip yang sudah ada, serta ketersediaan anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Salah satu penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan JIKN menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu “Implementasi JIKN dan Kaitannya terhadap kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh ”, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait dengan yang pernah dilakukan. Tema penelitian yang membahas tentang Penerapan JIKN sebelumnya pernah dilakukan.

Penelitian pertama oleh Yodytian Putera dengan judul skripsi “Efektifitas Pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Pada Arsip Nasional RI (ANRI)”. Dalam penelitian Yodytian Putera, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sebagai salah satu bentuk pengembangan *e-government* dapat memberikan percepatan akses pelayanan kearsipan kepada pengguna melalui satu jaringan berskala nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini sesuai dengan penggunaan metode survei yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dari Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dibangun oleh Arsip Nasional (ANRI).

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian di atas adalah pada variabel, subjek dan tempat. Adapun yang menjadi variabel pada penelitian di atas adalah Efektifitas Pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Pada Arsip Nasional RI (ANRI), subjek penelitian dilakukan pada seluruh anggota yang memanfaatkan JIKN dalam penelusuran informasi bertempat di Arsip Nasional Ri (ANRI). Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti variabel tentang kesiapan dalam implementasi jaringan informasi kearsipan (JIKN) dengan subjek penelitian dilakukan pada Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip khususnya kepala Seksi informatika Kearsipann serta 2 orang staf pada bidang tersebut, dan bertempat di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

B. IMPLEMENTASI JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)

1. Pengertian Implementasi JIKN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹ Artinya suatu hal yang dilaksanakan dan diterapkan adalah sesuatu yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap benar dan layak digunakan.

¹ Lukman Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 447

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip statis secara nasional yang merupakan salah satu usaha ANRI dalam memodernisasi administrasi dan layanan, yang merupakan perwujudan usaha dari ANRI untuk dapat mereformasi administrasi di Indonesia. Pengembangan JIKN juga sejalan dengan misi ANRI untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-government*, dan dokumen atau arsip negara dalam pengelolaan tugas fungsi pemerintahan merupakan arah kebijakan ANRI pada tahun 2004-2009 dan visi ANRI sebagai simpul pemersatu bangsa.²

Infrastruktur aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) akan terwujud dalam bentuk aplikasi dan *website* yang akan memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Aplikasi SIKN merupakan aplikasi yang dipergunakan oleh simpul jaringan dalam menghimpun data dan informasi kearsipannya. Aplikasi ini berupa *web service* yaitu sekumpulan data (*database*), perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai perangkat terletak pada server yang terhubung ke internet yang mendukung interoperabilitas dan interaksi sistem pada jaringan. Aplikasi SIKN hanya terbatas digunakan oleh pengguna tertentu di instansi bersangkutan dan pengguna lainnya yang telah mendapat kewenangan dari administrator sesuai dengan perannya. *Website* JIKN merupakan antarmuka pengguna

² *Jaringan Informasi Kearsipan Nasional*, <https://www.jikn.go.id>, pada tanggal 15 November 2016, diakses pada pukul 15:25

umum (masyarakat) untuk mencari informasi kearsipan secara nasional yang sebelumnya telah dihimpun oleh simpul jaringan menggunakan aplikasi SIKN. Fitur lainnya yang terdapat pada *website* JIKN adalah pencarian arsip tematik, pameran arsip virtual, galeri arsip, pemesanan arsip *online*, pesan baca arsip *onsite*, *link* ke lembaga kearsipan dan lain-lain.

2. Tujuan dan Fungsi JIKN

JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

JIKN juga memiliki peran penting dalam konteks negara kesatuan, yakni sebagai sarana bantu penyatuan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah atau terpecah-pecah (*fragmented documentary history*) di antara para penyelenggara kearsipan seluruh Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki banyak propinsi dan kabupaten/kota, menghadapi tantangan, yaitu banyak arsip yang merekam saat ini dan sejarah masa lampau mengenai suatu subjek tertentu, tetapi mungkin disimpan oleh penyelenggara kearsipan yang tersebar lintas yurisdiksi dan geografi sebagai akibat dari perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran pemerintahan. Karena sulit untuk menyatukan bahan-bahan tersebut secara fisik, mengingat tersebar lintas yurisdiksi dan geografi yang berbeda, maka JIKN yang

berbasis teknologi menawarkan suatu solusi dalam rangka menciptakan memori virtual secara nasional.

Selain itu JIKN bertujuan untuk meningkatkan minat para pengguna arsip dinamis dan statis. Dengan menggunakan internet, "kunjungan" ke khasanah arsip akan lebih mudah dilakukan, di samping juga meningkatkan pemberdayaan arsip dinamis dan statis oleh masyarakat. JIKN mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan kepada publik.
- b. Menyatukan kearsipan diseluruh Indonesia menjadi layanan yang terintegrasi.
- c. Memudahkan pencarian dan penelusuran arsip dinamis dan statis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Meningkatkan pemberian pelayanan penggunaan arsip dinamis dan statis;
- e. Meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di bidang arsip.³

3. Dasar Hukum JIKN

Dalam pembentukan dan penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang ditulis oleh peneliti adalah masih berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kearsipan dan Keputusan Presiden RI nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis pada pasal 27-41. Untuk JIKN saat ini telah menggunakan Undang-Undang Kearsipan terbaru yaitu nomor 43 tahun 2009. Berdasarkan amanat yang ada

³ *Jaringan Informasi Kearsipan Nasional*, <https://www.jikn.go.id/Info/TentangJIKN.aspx> , diakses pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 22:25

dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 disebutkan bahwa Arsip Nasional RI harus selalu menerbitkan penyelenggaraan arsip dinamis aktif ataupun inaktif serta berkewajiban menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip statis dari lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah, swasta, dan perorangan.

Dengan melihat pembangunan yang terjadi pada masa modern ini, tugas pokok Arsip Nasional RI untuk dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga dikembangkan sistem kearsipan dengan bantuan Teknologi Informasi berupa SiPATIK (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk pengelolaan arsip dinamis, dan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SJIKN) untuk arsip statis yang dikelola secara fungsional dan professional. Hal ini dilakukan sebagai bagian terpadu untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan (*Sustainable Development*) dan memori kolektif dan bukti jati diri bangsa (Nationla Heritage) sebagai bahan pertanggungjawaban nasional.

4. Anggota JIKN

Anggota JIKN merupakan seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 diikuti oleh setiap kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut

Tabel 2.1 Anggota JIKN.

N	KODE	NAMA ANGGOTA JARINGAN
ARSIP NASIONAL R.I.		
	0000	ARSIP NASIONAL R.I.
PROVINSI		
1	1100	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2	1200	SUMATERA UTARA
3	1300	SUMATERA BARAT
4	1400	RIAU
5	1500	JAMBI
6	1600	SUMATERA SELATAN
7	1700	BENGKULU
8	1800	LAMPUNG
9	1900	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
10	2100	KEPULAUAN RIAU
11	3100	DKI JAKARTA
12	3200	JAWA BARAT
13	3300	JAWA TENGAH
14	3400	DAISTA YOGYAKARTA
15	3500	JAWA TIMUR
16	3600	BANTEN
17	5100	BALI
18	5200	NUSA TENGGARA BARAT

19	5300	NUSA TENGGARA TIMUR
20	6100	KALIMANTAN BARAT
21	6200	KALIMANTAN TENGAH
22	6300	KALIMANTAN SELATAN
23	6400	KALIMANTAN TIMUR
24	7100	SULAWESI UTARA
25	7200	SULAWESI TENGAH
26	7300	SULAWESI SELATAN
27	7400	SULAWESI TENGGARA
28	7500	GORONTALO
29	7600	SULAWESI BARAT
30	8100	MALUKU
31	8200	MALUKU UTARA
32	9100	PAPUA
33	9200	PAPUA BARAT

C. Elemen Informasi Arsip Statis pada JIKN

Format deskripsi untuk elemen informasi arsip statis yang dimuat di JIKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Elemen Informasi

Nomor	Menunjukkan nomor elemen data dari informasi arsip yang dimuat dalam JIKN
Nama Elemen	Nama data yang merupakan bagian dari informasi tentang suatu arsip statis yang dimuat di JIKN.

Sub-elemen	Sub-elemen yang berkaitan dengan elemen data
Pengertian	Menjabarkan pengertian elemen data dari informasi arsip yang dimuat dalam JIKN
Tujuan	Menunjukkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan elemen tersebut dalam penyajian informasi arsip yang dimuat dalam JIKN
Penerapan	Menunjukkan pada tingkatan penataan arsip apa elemen data ini diterapkan
Format Nilai	Aturan atau standar yang menjadi dasar pengisian nilai elemen data dari informasi arsip yang dimuat dalam JIKN
Ketentuan Penggunaan	Menjabarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat pengisian suatu elemen data
Keterangan	Berisikan informasi tambahan mengenai penggunaan dan penerapan suatu elemen data
Contoh	Berisikan contoh penerapan elemen data

Tabel 2.3 Format Deskripsi Untuk Sub-Elemen Informasi

Nomor	Menunjukkan nomor sub-elemen data dari informasi arsip yang dimuat dalam JIKN
Nama Sub-Elemen Informasi	Nama data yang merupakan bagian dari elemen informasi arsip statis yang dimuat di JIKN yang memberikan keterangan lebih rinci dari elemen induknya
Pengertian	Menjabarkan pengertian sub-elemen data dari informasi arsip yang dimuat dalam JIKN

Tujuan	Menunjukkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan sub-elemen tersebut dalam penyajian informasi arsip yang dimuat dalam JIKN
Penerapan	Menunjukkan pada tingkatan penataan arsip apa sub-elemen data ini diterapkan
Format Nilai	Aturan atau standar yang menjadi dasar pengisian nilai sub- elemen data dari informasi arsip yang dimuat dalam JIKN
Ketentuan Penggunaan	Menjabarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat pengisian suatu sub-elemen data
Keterangan	Berisikan informasi tambahan mengenai penggunaan dan penerapan suatu sub-elemen data
Contoh	Berisikan contoh penerapan sub-elemen data

1. Pedoman dan Standar JIKN

Adapun Pedoman dan Standar JIKN, yaitu sebagai berikut :

1. Pedoman penyelenggaraan JIKN
2. Ketentuan fungsional sistem JIKN
3. Elemen informasi arsip statis yang dimuat di JIKN
4. Petunjuk teknis penataan informasi arsip statis yang dimuat di JIKN
5. Petunjuk teknis pencitraan digital arsip statis yang dimuat di JIKN

Dengan merujuk pada pedoman dan standar JIKN maka ANRI sebagai Pusat Jaringan Nasional memiliki tugas, yaitu:

1. Untuk menetapkan pedoman penyusunan informasi untuk setiap naskah arsip statis yang dimuat di JIKN
2. Menetapkan informasi yang dimuat dalam JIKN untuk arsip statis yang bersifat rahasia
3. Menetapkan ketentuan dan melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pelayanan sistem JIKN
4. Menetapkan persyaratan dan tata cara menjadi Anggota Jaringan bagi Lembaga Pencipta Arsip.

Sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) terdiri dari Lembaga Kearsipan Provinsi yang bertindak sebagai Pusat Jaringan pada tingkat daerah, Kabupaten dan kota sebagai anggota Jaringan Lembaga Kearsipan Daerah. Oleh karena itu dalam penyampaian daftar khasanah arsip pada tingkat daerah melalui Lembaga Kearsipan Provinsi. Dalam sistem JIKN LKD memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan informasi untuk setiap naskah arsip statis dalam daftar arsip statis sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI
2. Penyampaian daftar arsip statis kepada Pusat Jaringan
3. Pengelolaan jaringan informasi Kearsipan Nasional di Lingkungannya

4. Penyediaan dan penyebarluasan informasi arsip statis
5. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan

2. Pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Rencana Strategis ANRI tahun 2010-2014 pun tetap fokus pembangunan kearsipan, yaitu mengembangkan manajemen arsip atau dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi lingkungan lembaga aparatur negara. Sedangkan Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis telah mengatur adanya pembentukan jaringan informasi kearsipan yang bersifat nasional. Dalam Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 itu juga dijelaskan dalam penyelenggaraan JIKN merupakan tugas dari ANRI sebagai pusat jaringan nasional, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sebagai anggota jaringan serta lembaga-lembaga pencipta arsip (Swasta atau Perorangan) yang berkeinginan menjadi anggota. Melalui peran JIKN diharapkan akan tercipta pengaturan informasi arsip yang mendorong adanya budaya berbagi informasi dan kerjasama antar unit kerja, departemen ataupun masyarakat.

Pengembangan JIKN yang diterapkan oleh ANRI akan mendorong adanya budaya berbagi informasi dan kerjasama antar unit kerja, departemen ataupun masyarakat. Penerapan *e-government* yang dilakukan ANRI menurut Norris akan menciptakan hubungan yang dikenal dengan G2G (*Government to Government*),

G2B (*Government to Business*), dan G2C (*Government to Citizen*).⁴ Efektifitas pengembangan JIKN terdapat beberapa kajian yang membahas tentang model pengembangan. Keberagaman model yang ada biasanya digunakan untuk melihat posisi dan mengevaluasi status keefektifan pengembangan *e-government* (Jansen, 2004, h.480)⁵. Untuk itu maka pengukuran efektifitas pengembangan JIKN dapat dilakukan dengan melihat indikator kinerja. Oleh karena itu dalam mengambil kesimpulan mengenai efektifitas JIKN dapat menggunakan indikator kinerja JIKN.

Dalam pengembangan *e-government* dipemerintahan terdapat beberapa prinsip dasar sistem *e-government*. Prinsip ini memiliki tujuan agar pemerintah memiliki sasaran dan tujuan yang sesuai ketika akan melaksanakan perubahan layanan secara *online*. Prinsip-prinsip dasar ini dapat digunakan dalam mengembangkan JIKN sebagai bentuk dari penerapan *e-government*, sehingga akan terbentuk pedoman dalam pengembangan layanan JIKN.

Dengan memperhatikan setiap prinsip dasar ini nantinya dapat mengukur efektifitas *e-government* yang telah berjalan. Beberapa prinsip dasar dalam pengembangan *e-government* menurut Yong.⁶ Yaitu:

1. *Accessibility*

⁵ Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Governement: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. (Yogyakarta: ANDI. 2002) hlm. 480.

⁶ Nugroho, Priyadi Arie Nugroho. (2004). Disertasi. *Analisa Penerapan Strategi Pengembangan E-government di Departemen Perindustrian dan Perdagangan*. Depok: Program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik Studi Teknik Elektro Universitas Indonesia

Berdasarkan prinsip dasar menurut Yong, *e-government* haruslah berbentuk pelayanan satu atap, mudah diakses, intuitif, dan didalamnya menyediakan berbagai kebutuhan bagi para *stakeholder*. Dengan melihat prinsip *accessibility* menurut Tangkilisan akan berkaitan dengan kesediaan aparatur Negara untuk memberikan pelayanan kepada pengguna secara merata⁷. Dengan meratanya pelayanan maka akan terhindar dari kesenjangan (*gap*) dalam pemberian pelayanan yang berdampak pada kualitas pelayanan.

2. *Availability*

pelayanan *e-government* harus selalu tersedia setiap saat 24 Jam x 7 hari per minggu x 365 hari per tahun (24 x 7 x 365), di rumah, di kantor, di sekolah, di perpustakaan dan lokasi publik lainnya yang nyaman sehingga dimanapun dan kapanpun masyarakat berada dapat selalu mengaksesnya. Menurut Tony Blair *e-government* digunakan untuk menggabungkan penyediaan layanan di seluruh departemen dan untuk menghilangkan batasan sehingga dimungkinkan interaksi dengan pemerintah dirumah, dikantor, dan dimana saja.⁸

3. *Security*

E-government haruslah memiliki standar berkaitan dengan sistem keamanan datanya, terutama data-data personal orang lain. Hal ini erat kaitanya dengan

⁷ Tangkilisan, Hessel Nogi S (2005). *Manajemen Publik*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005) hlm. 222

⁸ Blair, Tony. *Egov: Electronic Government Services for the 21st Century*. (Inggris: a Performance and Innovation Unit. 2000) hlm. 6

membangun kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas *e-government*. Terdapat tiga komponen penting dari kepercayaan publik saat menggunakan pelayanan *e-government*.⁹ yaitu :

- A. Kebijakan keleluasaan pribadi untuk perseorangan atau pemilik informasi menyajikan secara *online*.
- B. Kepercayaan akan informasi individu tidak akan disalahgunakan
- C. Keamanan saat *online*, terutama untuk transaksi keuangan dan pembayaran *online*.

4. *Integrability*

E-government harus dapat selalu terhubung ke dalam sistem *database (back end)*, baik intra maupun lintas sektoral pemerintahan. Keterhubungan ini akan mempermudah menjalin interaksi dan hubungan antara pemerintahan yang ada dipusat dengan pemerintahan yang ada didaerah.

5. *Sustainability*

E-government pada akhirnya diharapkan agar dapat membiayai dirinya sendiri sehingga proyek ini dapat terus melangsungkan kegiatannya tanpa membebani Negara dikemudian hari. Keberlangsungan *e-government* yang dicanangkan dalam suatu proyek harus dapat berjalan dari tahun ke tahun dan tidak berhenti seketika. Hal ini dimaksudkan karena pembiayaan yang tinggi dalam pembangunan *e-government*

⁹ Yong, James SL. *Enabling Public Service Innovation in the 21st Century: E-Government in Asia*. Singapura: Times Edition. 2003) hlm. 34

sehingga aspek keberlanjutan memiliki peran penting dalam pembangunan *e-government*.

D. Implementasi JIKN terhadap kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan

Dalam konteks NKRI Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan (JIKN) merupakan sarana bantu penyatuan informasi kearsipan dan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah di antara para pencipta arsip maupun lembaga kearsipan di seluruh Indonesia. Dalam konteks Keterbukaan Informasi Publik, JIKN dapat menjadi sarana bantu implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh badan publik baik di pusat maupun daerah. SIKN dan JIKN sangat terkait dengan *Open Government* Indonesia, karena melalui website JIKN masyarakat dapat langsung mencari dan mendapatkan informasi dalam wujud arsip secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah, sesuai dengan prosedur dan aturan Keterbukaan Informasi Publik instansi yang bersangkutan.

Implementasi JIKN dengan melalui website JIKN yang merupakan aspek penting dalam dunia informasi kearsipan, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta perguruan tinggi negeri sebagai simpul jaringan akan terhubung, sehingga informasi kearsipan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dimanapun berada. Namun Badan Arsip dan perpustakaan provinsi harus memiliki kesiapan sumber daya pendukung untuk implementasi SIKN dan JIKN, seperti: koneksi internet, alat alih media, komputer, SDM untuk pelaksana entry, pelaksana editor dan penentu keterbukaan dan ketertutupan informasi arsip, daftar arsip dinamis, daftar arsip statis, aplikasi pengelolaan arsip yang sudah ada, serta ketersediaan anggaran. Sehingga

dapat meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat. JIKN digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Informasi kearsipan bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.² Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Mohd. Nazir yang menyatakan bahwa, “metode diskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki”.³ Metode deskriptif yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah pada masa sekarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam

¹Mardalis, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 24.

²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm.106.

³Moh. Nazir, *Metode Penelitian, cet.1*, (Jakarta : Ghilia Indonesia, 1985),hlm.65.

wawancara dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang tersebut”.⁴ Menurut Maleong “metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati sebagai suatu kebutuhan”.⁵

Sejalan dengan definisi di atas, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dan ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁶ Dengan demikian penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengadakan analisis data secara induktif.

Dalam pengumpulan data penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* yaitu mengumpulkan data lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan terhadap objek penelitian, yaitu meneliti bagaimana Implementasi JIKN dan Kaitainnya terhadap kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis melakukan penelitian. Adapun yang menjadi tempat atau lokasi penelitian dalam Penelitian ini adalah pada Badan

⁴ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

⁵ Ibid, hlm. 11.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Kulaitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988) hlm 3

Arsip dan Perpustakaan Aceh yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief (Lampineung) Banda Aceh. Alasan penulis memilih lokasi ini karena hanya di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yang telah menerapkan JIKN.

Adapun mengenai waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli . Penelitian ini berkisar selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan kaitannya dengan kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai referensi pada penelitian.⁷

Penelitian lapangan penulis lakukan dengan Observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸ Salah satu metode pengumpulan data dilakukan wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan secara langsung dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

Ada dua jenis wawancara jika dilihat dari sifat pertanyaannya yaitu wawancara tertutup dan terbuka. Pada wawancara tertutup, baik yang diwawancarai atau pewawancara betul-betul terikat pada struktur susunan pertanyaan wawancara. Sebaliknya, model pertanyaan terbuka pewawancara dapat melakukan observasi jawaban lebih jauh lebih dalam dan leluasa karena tidak terikat pada satu struktur susunan tertentu.

Wawancara pada penelitian ini merupakan wawancara terbuka yang dilakukan secara terstruktur (*guidance interview*) dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai panduan bertanya, wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Badan Arsip dan Perpustakaan, dan Kepala Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip khususnya pada Sub Bidang Sistem Informatika Kearsipan, yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Sedangkan wawancara dengan informan berlangsung lebih kurang 2 minggu, dengan frekuensi waktu setiap melakukan wawancara yaitu berkisar antara setengah jam sampai satu jam sesuai

⁸Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cet.IX*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), hlm.83.

pertanyaan yang diajukan kepada informan mengenai kebijakan penyelenggaraan SIKN, JIKN dan Implementasi SIKN dan JIKN pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁹ Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi secara terbuka. Peneliti melakukan pengumpulan data mengatakan yang sebenarnya kepada narasumber (informan) bahwa, peneliti sedang melakukan penelitian dokumentasi merupakan salah satu instrument peneliti lakukan sebagai bahan observasi sehingga peneliti dapat memperoleh keterangan data dan informasi akurat untuk mendukung keluaran yang diharapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan

⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan¹⁰.

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum sekolah, struktur organisasi sekolah dan personalia, keadaan guru dan peserta didik, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, artinya penulis melakukan pengumpulan data dari penelitian untuk selanjutnya disusun secara sistematis. Data dari hasil wawancara, observasi (pengamatan) dan analisis dikumpulkan dan dilakukan pemisahan antara data penting dan tidak penting. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data untuk dijabarkan sebagai hasil penelitian.

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena pada tahap inilah peneliti dapat merumuskan hasil-hasil penelitian, menyusun, mengklasifikasikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.¹¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan mengikuti prosedur yang dikemukakan oleh Milles dan Heberman dalam Riyanto, yaitu reduksi data,

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 143.

¹¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 340

display data dan mengambil kesimpulan serta Verifikasi.¹² Teknik pengolahan data dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Editing, melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua data telah benar dan tepat.
2. Analisis, yaitu kegiatan setelah data terkumpul dan dikelompokkan berdasarkan variable dan jenis responden berdasarkan landasan teori.
3. Kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan akhir berdasarkan hasil analisa data secara tertulis tentang Implementasi JIKN dan Kaitannya terhadap kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

Analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan di dalam *research*, setelah mendapatkan data dari lokasi penelitian data tersebut dianalisis secara kontinue sesuai dengan hasil catatan lapangan untuk menentukan apa yang menjadi fokus dan tujuan penelitian.

¹²Riyanto, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2001). hlm. 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

1. Sejarah Umum Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh pertama didirikan pada tahun 1969 bernama Perpustakaan Negara yang berlokasi pada salah satu ruangan seluas 12 m² di Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh dengan jumlah koleksi 80 eksemplar dan Pegawai 2 orang. Berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.8429/c/B.3/1979 tanggal 29 Oktober 1979 berubah menjadi Perpustakaan Wilayah. Pada tahun 1989 terbit Kepres no.11/1989 yang mengatur bahwa Perpustakaan Wilayah berubah nama menjadi Perpustakaan Daerah.

Terbitnya Kepres no.50 tahun 1997 tentang perubahan Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI yang berdampak pula pada perubahan nama dari Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi D. I Aceh. Terbitnya Perda no.39 tahun 2001 Perpustakaan Nasional Provinsi D.I Aceh telah menjadi salah satu lembaga Daerah dengan nama Badan Perpustakaan Provinsi NAD.

Terakhir Qanun No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun no.5 tahun 2007 tentang perubahan struktur Organisasi Pemerintahan Daerah maka Badan Perpustakaan Provinsi NAD di gabung dengan Badan Arsip Provinsi NAD dengan nama Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh. Badan Arsip

dan Perpustakaan Provinsi Aceh setiap tahunnya menambah koleksi buku, rakbuku, meja dan kursi baca, serta pemeliharaan jaringan LAN serta mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari Lembaga Pemerintah maupun NGO seperti Perpustakaan Nasional R.I, Perpustakaan Nasional Australia, Persatuan Pustakawan Malaysia, World Vision, Goethe Institut, UNESCO, Kota Augsburg Jerman, dan lain-lain.

2. Tugas dan Fungsi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Aceh dibidang pembinaan dan pengolahan, perpustakaan, dokumentasi dan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh.

Selain melakukan tugas tersebut, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sebagai lembaga dalam sistem pemerintahan Aceh memiliki beberapa fungsi;

1. Perumusan kebijakan teknis dan program Arsip dan Perpustakaan
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Arsip dan Perpustakaan
3. Pengelolaan Arsip dan bahan pustaka pelayanan teknologi kearsipan dan perpustakaan

3. Visi dan Misi

Adapun visi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah mewujudkan Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembangunan SDM yang islami.

Sedangkan misi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bukti akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh
- b. Meningkatkan pelayanan dan sarana kearsipan dan perpustakaan.
- c. Menggali, menyelamatkan, melestarikan dan memanfaatkan khasanah budaya Aceh dan nilai-nilai dinul Islam.
- d. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur kearsipan dan perpustakaan.
- e. Membina dan mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat.
- f. Meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana dan pembangunan sumber daya manusia.
- g. Membina kerjasama kearsipan dan perpustakaan di dalam dan luar negeri.¹

4. Data Arsip yang ada di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh terdapat banyak koleksi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jumlah koleksi tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut data arsip koleksinya ,

Tabel.4.1.
Laporan Koleksi dan Anggota Pengguna Tahun 2016 Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

Jumlah Data Koleksi	45.340 Item
Total Jumlah Data Koleksi	197.680 Item
Total Jumlah Data Anggota	16.954 Orang
Total Jumlah Peminjaman	3.417 dari 115.266

Tabel. 4.2.
Laporan Koleksi Deposit dari Tahun 1950-2016 Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

Daftar Buku Deposit dan Buku tentang Aceh	7.674 Eksamplar
Koleksi Buku Hunting	3.271 Eksamplar
Jumlah	10.945 Eksamplar

¹Brosur Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tahun 2016.

B. Hasil Penelitian

JIKN merupakan system jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip statis secara nasional yang merupakan salah satu usaha ANRI dalam memodernisasi administrasi dan layanan, yang merupakan perwujudan usahadari ANRI untuk dapat mereformasi administrasi di Indonesia. Undang-Undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 68 juga telah menegaskan bahwa pencipta arsip dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau mengalihmediakan menjadi arsip elektronik atau bentuk lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip secara elektronik sudah diakui dan diatur dengan undang-undang.

Dalam pembentukan dan penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang ditulis oleh penulis adalah masih berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nizar mengatakan bahwa “kebijakan penyelenggaraan SIKN dan JIKN pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh merupakan suatu kebijakan yang bersifat tidak wajib, karena seluruh anggaran dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN ditanggung penuh oleh instansi atau dinas yang bersangkutan”²

Walaupun penyelenggaraan SIKN dan JIKN tidak diwajibkan oleh ANRI, namun Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh telah menyelenggarakan SIKN dan

²Hasil Wawancara dengan Muhammad Nizar, Kasi Sistem Informatika dan Kearsipan. (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tanggal 20 Juni 2017)

JIKN ini yaitu pada tanggal 2 Januari 2014. Untuk JIKN, saat ini telah menggunakan Undang-Undang Kearsipan terbaru yaitu nomor 43 tahun 2009. Dalam hal ini Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh ingin menjalankan amanat yang ada dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 SIKN dan JIKN, yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan arsip statis secara nasional, memiliki tujuan mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan Negara, serta menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia dan menyelamatkan arsip statis dan dinamis dari lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah, swasta, dan perorangan.

Dengan melihat pembangunan yang terjadi pada masa modern ini, tugas pokok Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh untuk dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga dikembangkan sistem kearsipan dengan bantuan Teknologi Informasi berupa SiPati (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk pengelolaan arsip dinamis, dan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SJIKN) untuk arsip statis yang dikelola secara fungsional dan professional. Hal ini dilakukan sebagai bagian terpadu untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan (Sustainable Development) dan memori kolektif dan bukti jati diri bangsa (National Heritage) sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. Pada sisi itu JIKN akan memberikan rupa nyata pada visi penyelenggaraan kearsipan nasional yang menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa.

Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa JIKN dapat dijadikan media akses informasi yang sangat mudah, cepat, dan menarik dalam pencarian identitas dan silsilah diri dan sebagainya karena data yang diinput tidak hanya arsip statis namun juga arsip dinamis. JIKN juga akan menjadi sarana pendidikan demokrasi yang andal, mengingat arsip adalah juga bukti dari pelaksanaan hak dan kewajiban dari negara maupun warga negara. Dengan menyediakan akses yang luas dan mudah terhadap arsip statis, JIKN dengan sendirinya mendukung upaya penegakan hak warga negara untuk memperoleh informasi. Adapun hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut;

1. Implementasi JIKN di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

Dalam Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 itu juga dijelaskan dalam penyelenggaraan JIKN merupakan tugas dari ANRI sebagai pusat jaringan nasional, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sebagai anggota jaringan serta lembaga-lembaga pencipta arsip (Swasta atau Perorangan) yang berkeinginan menjadi anggota.

Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang diselenggarakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh Merupakan sebagai salah tugas Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam mengalihmediakan menjadi arsip elektronik atau bentuk lain dengan tujuan untuk menjaga dokumen maupun arsip agar dapat diakses dan digunakan sepanjang ada nilai gunanya dan untuk membuat informasi dari dokumen dan arsip, tersedia format yang tepat, digunakan oleh orang yang tepat, dan dapat digunakan pada saat yang tepat.

Hendra menjelaskan tentang penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) melalui wawancara sebagai berikut:

“Dalam Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), ANRI terlebih dahulu melakukan sosialisasi dalam penerapan JIKN. Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SJIKN) telah diimplementasikan di unit kerja lingkungan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sejak Tanggal 2 Januari Tahun 2014 sebagai pendukung proses pelaksanaan kearsipan dan telah berjalan hingga sekarang.³

Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sebagai pendukung proses pelaksanaan kearsipan sehingga memudahkan arsiparis dan petugas kearsipan dalam melakukan pekerjaan kearsipan karena adanya pemanfaatan media elektronik sehingga pekerjaan kearsipan lebih efektif dan efisien. Karena dengan adanya JIKN akan terbentuk suatu standar tentang bagaimana arsip statis diinformasikan kepada masyarakat luas untuk mempercepat menemukan arsip yang dikehendaknya. Selain itu juga JIKN dapat memberikan gambaran secara akurat mengenai arsip yang dicarinya sehingga dengan adanya JIKN dapat mempermudah akses pengguna dalam menelusur khasanah arsip yang dibutuhkan.

Arsip yang tersedia pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh didukung oleh suatu sistem aplikasi yang diberi nama JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional). Sistem JIKN telah diimplementasikan di unit Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sejak Tahun 2014 sebagai pendukung proses pelaksanaan kearsipan elektronik. Implementasi JIKN memudahkan arsiparis dan petugas kearsipan dalam melakukan pekerjaan kearsipan karena

³Hasil wawancara dengan Hendra Mirza, Staff Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip. (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 20 Juni 2017)

adanya pemanfaatan media elektronik sehingga pekerjaan kearsipan lebih efektif dan efisien. Melalui peran JIKN diharapkan akan tercipta pengaturan informasi arsip yang mendorong adanya budaya berbagi informasi dan kerjasama antar unit kerja, departemen ataupun masyarakat. Pengembangan JIKN yang diterapkan oleh ANRI akan mendorong adanya budaya berbagi informasi dan kerjasama antar unit kerja, departemen ataupun masyarakat.

Untuk mekanisme dalam proses Implementasi JIKN, Muhammad Nizar mengatakan bahwa:

“Sebelum menyelenggarakan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), terlebih dahulu ANRI melakukan sosialisasi ke seluruh Perpustakaan Umum di Indonesia. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, dalam hal ini menugaskan pustakawan/arsiparis sebanyak 5 orang untuk mengikuti pelatihan tentang JIKN di Kantor Pusat Jakarta. Setelah itu diusulkan kepada kepala dinas dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam menyelenggarakan JIKN.”⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, sebelum implementasi JIKN, ANRI terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pustakawan melalui kegiatan pelatihan/workshop tentang JIKN. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh juga terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada ANRI terhadap simpul jaringan. Adapun mekanisme dalam implementasi JIKN adalah sebagai berikut :

⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Nizar, Kasi. Sistem Informatika Kearsipan. (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 20 Juni 2017)

Tabel 4.3
Rencana Implementasi SIKN dan JIKN

1.	Sosialisai ANRI	<ul style="list-style-type: none"> •Rakornas •Workshop •Konsultasi Sistem Informasi Kearsipan
2.	Konsultasi (simpul Jaringan ke ANRI)	<ul style="list-style-type: none"> •Konsultasi Proses Pendaftaran •Konsultasi Kesiapan Sumber Daya & Infrastruktur Pendukung •Konsultasi Rencana Implementasi
3.	Uji Coba Simpul Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> •Uji Coba pada Server Diklat •Magang di ANRI
4.	Uji Coba Simpul Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> •Penetapan Kebijakan Pimpinan •Kesiapan Sumber Daya •Kerja Sama dengan PT. Telkom dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Cloud

2. Kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam implementasi JIKN

Rencana Strategis ANRI tahun 2010-2014 tetap fokus pembangunan kearsipan, yaitu mengembangkan manajemen arsip atau dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi lingkungan lembaga aparatur negara. Sedangkan Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis telah mengatur adanya pembentukan jaringan informasi kearsipan yang bersifat nasional.

Namun dalam perkembangannya, JIKN yang pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan menghadapi hal baru disebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan serta Undang-Undang nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Hal ini berkaitan

dengan pembangunan Sistem Informasi Kearsipan nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dimana informasi kearsipan yang disediakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh tidak lagi hanya terbatas pada khasanah arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan namun juga mencakup informasi mengenai arsip dinamis yang ada disemua lembaga penyelenggara Provinsi atau daerah sebagai pencipta arsip. Untuk kesiapan dalam implementasi JIKN, Hendra mengatakan bahwa:

“Data awal yang dimiliki oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebanyak 230 Berkas dan 174 daftar arsip statis. Ini merupakan daftar arsip terbanyak di tingkat Nasional, bahkan berada diatas data ANRI dan juga Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh pernah mendapatkan penghargaan sebagai simpul teraktif tingkat nasional pada tanggal 24 September 2014 di Jakarta, dengan banyaknya data yang diinput serta jumlah pengunjung yang mengunjungi website JIKN ini ”.⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Implementasi JIKN pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh mempunyai data yang sangat memadai. Sehingga Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam implementasi JIKN serta kesiapannya yaitu SDM, fasilitas dan sarana yang tersedia. Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh khasanah arsip statis tidak hanya arsip yang berbentuk konvensional namun sudah ada yang berbentuk media baru seperti Video, CD, micro film, foto maupun rekaman suara. Adapun sarana yang digunakan dalam mengimplementasikan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai berikut,

⁵Hasil wawancara dengan Hendra Mirza, Staff Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip, (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tanggal 20 Juni 2017)

Tabel. 4.4
Sarana Sistem JIKN

No	Kantor Dinas	Peralatan Sistem JIKN
1	Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh	1. Komputer 2. Alat Alih Media/Scanner 3. Koneksi Internet 4. Storage Online 5. Printer 6. Software

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana yang digunakan dalam mengimplementasikan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dapat dikatakan sudah memadai yang terdiri beberapa macam. Sarana yang digunakan terdiri dari komputer, alat alih media/scanner, koneksi Internet, storage online, printer, dan software.

3. Kendala yang dihadapi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra mengenai kendala yang dihadapi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam implementasi JIKN adalah

*“Pertama, Keterbatasan kemampuan dan keterampilan SDM dalam bidang IT dan belum terbiasa pengelolaan arsip secara elektronik. Kedua, faktor pembiasaan para pegawai sudah terbiasa dengan pekerjaan kearsipan secara konvensional selama belum diterapkan JIKN ini dan ketika ada perubahan tidak dapat menyesuaikan perubahan dengan cepat. Untuk itu, ketika Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) diimplementasikan, arsiparis memberikan pelatihan teknis kepada para petugas kearsipan serta pengetahuan seputar JIKN.”*⁶

Hal yang sama diungkapkan oleh Muhammad Nizar selaku Kasi. Sistem Informatika dan Kearsipan mengenai kendala dalam implementasi Jaringan

⁶Hasil wawancara dengan Muhammad Nizar, Kasi. Sistem Informatika dan Kearsipan. (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tanggal 20 Juni 2017)

Informasi Kearsipan Nasional melalui hasil wawancara yang telah direduksi dengan beliau:

”Kendalanya adalah pada SDM para pegawai memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tentang ilmu komputer serta belum terbiasa dengan pengelolaan arsip secara elektronik. Usia juga sangat mempengaruhi penerapan sistem kearsipan elektronik karena pada umumnya para pegawai yang mengelola kearsipan adalah pegawai yang berusia tidak muda lagi. Secara teknis, tidak ada kendala pada setiap proses dalam sistem kearsipan elektronik. Kendala lain yang muncul adalah adanya pekerjaan lain di luar pekerjaan utama yang lebih menyenangkan.”⁷

Begitu pula yang diungkap oleh Hendra selaku staf Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip untuk kendala teknis dalam proses implementasi JIKN, Hendra mengatakan bahwa:

”Tidak ada kendala secara teknis yang dirasa menghambat dalam setiap proses sistem kearsipan elektronik. Kendala mendasar yang dihadapi hanya satu yaitu SDM. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pegawai menjadi kendala dalam implementasi JIKN dan secara tidak langsung akan berpengaruh dalam pekerjaan pengelolaan arsip.”⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi sistem kearsipan yaitu faktor sumber daya manusia yang merupakan kendala utama, faktor budaya kerja yang mana petugas kearsipan belum terbiasa dengan proses kearsipan elektronik dan masih terbiasa dengan proses kearsipan secara konvensional, dan faktor pekerjaan lain di luar pekerjaan utama.

⁷Hasil wawancara dengan Muhammad Nizar, Kasi. Sistem Informatika dan Kearsipan. (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tanggal, 20 Juni 2017)

⁸Hasil wawancara dengan Hendra Mirza, Staf Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip. (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tanggal 20 Juni 2017)

Untuk itu, solusi untuk menghadapi kendala tersebut menurut Muhammad Nizar selaku Ka. Kasi Sistem Informatika dan Kearsipan mengatakan bahwa,

”Solusi dalam menghadapi kendala yang berkaitan dengan faktor keterbatasan pegawai yang kurang menguasai IT yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis yang berkaitan dengan ilmu kearsipan itu sendiri maupun tentang sistemnya, memberikan pengetahuan dan wawasan tentang komputer yang berkaitan dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan menerapkan sistem tersebut dalam kegiatan sehari-hari yang penerapannya tidak hanya dilakukan oleh satu unit kerja tetapi semua unit kerja sehingga ada dorongan untuk mulai membiasakan segala pekerjaan arsip dengan menggunakan sistem tersebut.”⁹

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan solusi dalam mengatasi kendala teknis yang saat ini tidak lagi menjadi kendala yang menghambat proses kearsipan,

”Dengan adanya JIKN maka pencarian arsip tidak lagi dilakukan secara konvensional dengan mencari satu persatu arsip. Pencarian arsip bisa dilakukan dengan hanya menuliskan subjek atau objek arsip kemudian kita gunakan ”search” maka arsip yang kita cari akan segera ditemukan keberadaannya tanpa harus mencari dengan kartu kendali.”¹⁰

Dari pernyataan tersebut maka sebenarnya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) merupakan solusi yang telah terealisasi dalam mengatasi kendala proses kearsipan secara konvensional. Namun, implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) kembali menjadi kendala bagi petugas kearsipan. Dengan demikian, solusinya tidak hanya dengan memberikan wawasan, pelatihan teknis, dan dengan pembiasaan atau budaya kerja. Namun, perlu juga dengan pendampingan internal atau pendampingan secara teknis dari arsiparis dan perubahan pada pola pikir.

⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Nizar, Kasi. Sistem Informatika dan Kearsipan. (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tanggal 20 Juni 2017)

¹⁰Hasil wawancara dengan Hendra Mirza, Staff Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip. (Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tanggal 20 Juni 2017)

Untuk kendala nonteknis dalam implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Pada dasarnya, sumber daya manusia merupakan kendala utama dalam pengelolaan arsip, termasuk dalam implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

b. Fasilitas dan Dana

Keterbatasan sarana penunjang kearsipan elektronik, khususnya terbatasnya jumlah komputer, printer dan scanner/alat alih media yang digunakan dalam pencetakan. Hal ini erat kaitannya dengan terbatasnya dana dalam pengadaan fasilitas tersebut.

c. Mati Listrik/Server Mati

Mati listrik dan bermasalahnya server pusat akan mempengaruhi proses kearsipan elektronik, khususnya pada proses entri data karena Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh difungsikan sebagai sarana pelayanan informasi arsip secara lengkap, cepat, dan mudah.

C. Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh mulai mengimplementasikan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tanggal 2 Januari 2014. Implementasi JIKN di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, pada Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip yaitu Seksi Sistem Informatika dan Kearsipan didukung dengan penggunaan

hardware dan *software*. *Hardware* yang digunakan terdiri dari komputer, scanner, printer dan media penyimpanan, sedangkan *software*nya berupa sebuah aplikasi berbasis web dengan jaringan internet yang disebut dengan SIKN. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) perlu diimplementasikan dalam Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, menghadapi hal baru mengenai Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) maka lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Hal ini berkaitan dengan pembangunan Sistem Informasi Kearsipan nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dimana informasi kearsipan yang disediakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh tidak lagi hanya terbatas pada khasanah arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan namun juga mencakup informasi mengenai arsip dinamis yang ada di semua lembaga penyelenggara Provinsi atau daerah sebagai pencipta arsip. Pengimplementasian sistem manajemen kearsipan elektronik bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen pengelolaan arsip yang bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. Pengkajian ulang tentang ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan mengingat dalam Undang-Undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 5 ayat (1) tentang ruang lingkup kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. Secara tidak langsung, seluruh lapisan manajemen diharapkan mampu mengimplementasikan praktek tata kelola arsip elektronik. Undang-Undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 68 juga telah menegaskan bahwa pencipta arsip dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau mengalihmediakan menjadi arsip elektronik atau bentuk lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip secara elektronik sudah diakui dan diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya kurang siapan dari segi Sumber Daya Manusia dan sarana pendukung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dijabarkan pada bab IV sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan implementasi JIKN adalah sistem jaringan informasi & sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. JIKN dapat menjadi sarana bantu implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh badan publik baik di pusat maupun daerah pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dapat dikategorikan pada penilaian yang cukup efektif dengan adanya fasilitas, sarana yang tersedia .
2. Kesiapan implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, sudah sangat siap dengan segala fasilitas, sarana yang tersedia, dan tenaga SDM yang memadai. Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh khasanah arsip statis tidak hanya arsip yang berbentuk konvensional namun sudah ada yang berbentuk media baru seperti Video, CD, micro film, foto maupun rekaman suara.
3. Kendala dari implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Dinas Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan faktor pembiasaan budaya kerja pegawai.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran untuk dijadikan bahan pemikiran atau pertimbangan untuk kemajuan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh di masa mendatang, antara lain :

- a. Memberikan pembekalan ilmu melalui pelatihan khusus, dan pendampingan internal oleh arsiparis tentang implementasi JIKN kepada petugas kearsipan secara berkesinambungan.
- b. Membuat perencanaan agar SDM di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sesuai dengan disiplin keilmuan di bidangnya masing-masing agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- c. Dengan memberikan wawasan bersupa kegiatan kearsipan secara elektronik kepada petugas kearsipan akan membuat petugas memahami sistem kinerja JIKN dan SIKN sehingga terwujudnya implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- d. Mensosialisasikan implementasi JIKN kepada masyarakat agar menggunakan JIKN untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthos, Basir . *Manajemen Kearsipan: Untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara. 2009).
- Blair, Tony. *Egov: Electronic Government Services for the 21st Century*. (Inggris: a Performance and Innovation Unit. 2000).
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.IX, (Jakarta: Bumi Aksara,2006)
- Contini, Francesco; Lanzara, Giovan Francesco. *ICT and Innovation in the Public Sector: European Studies in the Making of E-Government*.(Inggris; New York: Palgrave Macmillan, 2009).
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Governement: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. (Yogyakarta: ANDI. 2002)
- Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, <https://www.jikn.go.id>, pada tanggal 15 November 2016,
- Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Lukman Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mardalis, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet.1, (Jakarta : Ghilia Indonesia, 1985)
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Nugroho, Priyadi Arie Nugroho. (2004). *Disertasi. Analisa Penerapan Strategi Pengembangan E-government di Departemen Perindustrian dan Perdagangan*. Depok: Program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik Studi Teknik Elektro Universitas Indonesia
- Riyanto, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2001)
- Slameto, *Psikologi Pendidikan*, (Semarang: Gramedia, 2003).
- Struktur Organisasi Badan Arsip dan perpustakaan Provinsi Aceh, <http://bap.nad.pnri.go.id>, diakses pada tanggal 15 November 2016
- Suharsimi Arikunto, *Manejemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).

Yong, James SL. *Enabling Public Service Innovation in the 21st Century: E-Government in Asia*. (Singapura: Times Edition, 2003).

Sugiarto, Agus, dkk . *Manajemen Kearsipan Modern dari Konvensional ke Basis Komputer*.(Yogyakarta:Gava Media,2015)

DAFTAR WAWANCARA

Kebijakan Penyelenggaraan

1. Bagaimana latar belakang diselenggarakannya SIKN dan JIKN pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh ?
2. Bagaimana sebenarnya kebijakan penyelenggaraan SIKN dan JIKN pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh anda?(wajib ada, atau tidak harus)

Implementasi SIKN dan JIKN dan

3. Apa manfaat dan tujuan implementasi SIKN dan JIKN ini bagi Arsip dan Perpustakaan Aceh ?

Kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

4. Bagaimana Kesiapan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam Mengimplementasikan SIKN dan JIKN yang diberikan oleh ANRI, antara lain meliputi :
 - a. Aplikasi SIKN dan JIKN
 - b. Infrastruktur perangkat keras dan perangkat lain
 - Komputer/PC
 - Alat alih media/scanner
 - Koneksi internet dan
 - Storage online dan biayanya
 - c. SDM /pelaksana editor arsip/penentu keterbukaan dan tertutupan arsip, serta adakah bimbingan pelatihan khusus ?
 - d. Daftar arsip dan dinamis
 - e. Aplikasi manajemen arsip yang sudah ada
 - f. Ketersediaan anggaran
 - g. Help desk yang disediakan oleh ANRI dan TELKOM dalam membantu menyelenggarakan SIKN dan JIKN oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
5. Masalah-Masalah apa saja yang dihadapi oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam mengimplementasikan JIKN ?
6. Dengan melihat secara keseluruhan, apakah Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sudah siap dalam mengimplementasikan SIKN dan JIKN ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Irwansyah
2. Nim : 531002373
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Beusa, 12 Januari 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia /Aceh
6. No Handphone : 085260400640
7. Alamat : Jl. Rawasakti VII Jeulingke Banda aceh
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Murhaban
 - b. Ibu : Nurmala
10. Pekerjaan
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Jl. Rantau Panjang Desa Paya Seungat Peureulak Barat Aceh Timur.
12. Pendidikan
 - a. S D : SD Negeri 1 Kampung Beusa
 - b. SLTP : SMPN 1 Peureulak
 - c. SLTA : SMAN 1 Peureulak
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar Raniry Banda Aceh

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

(Irwansyah)